

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(P-RENJA)

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp./Fax. (0321) 321 953

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu tahun) untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama satu tahun kedepan. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini dapat memberikan arah pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Mei 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. Nugraha Budhi Sulistya, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690915 198903 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	8
2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	44
3.2.1. Tujuan	44
3.2.2. Sasaran	45
3.3. Program dan Kegiatan	45
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat	58
BAB V Penutup	67
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	67
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto	9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto	19
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto	30
Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto	41
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto	49
Tabel 4.1 Matrik Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat kerangka kebijakan, kegiatan, sasaran, uraian program kegiatan serta rencana indikatif pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam mengemban visi dan misi. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Tahapan dan tata cara penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu persiapan penyusunan rencana kerja PD, penyusunan rancangan rencana kerja PD, penetapan perubahan rencana kerja PD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis salah satunya yaitu Rencana Kerja (RENJA). Dan apabila ada 2 perubahan dalam penyesuaian kebutuhan diperbolehkan untuk mengusulkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA). Perubahan Rencana Kerja mengacu dan berpedoman pada landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan situasi dan

kondisi yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sampai dengan triwulan I terdapat beberapa realisasi kinerja yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Adapun ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud, yaitu:

1. adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. adanya pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto merupakan implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun perubahan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto. Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2020. Dokumen ini akan disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategis, mengkaji ulang terhadap rencana kerja sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal. Adapun proses penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2023 sebagaimana Surat Sekretaris Kabupaten Mojokerto, tanggal 10 Mei 2023, Nomor 050/1582/416-201.R/2023 perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

- Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 19. Peraturan Bersama Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;*
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);

35. Peraturan Bupati Mojokerto nomor 26 tanggal 6 Juli 2021 tentang RKPD Kabupaten Mojokerto;
36. Peraturan Bupati Mojokerto nomor 42 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
38. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 tanggal 22 September 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 101 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto;
40. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto nomor 188.4/33/416-206/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto:
41. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto nomor 188.4/1141/416-206/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah

- 1) Penyesuaian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 2) Penyesuaian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah :

- 1) sebagai acuan dalam penyusunan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023;
- 2) sebagai tolok ukur evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Renja Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Renja SKPD/PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Hambatan, Tantangan dan Peluang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemaangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat progam, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023.

BAB IV : PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 secara umum selaras dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya terdapat 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Adapun ikhtisar realisasi capaian target kinerja keuangan sampai dengan April 2023 sebesar 10,30% dari pagu anggaran Rp. 10.564.706.901,00 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran sebelum P-APBD	: Rp. 10.564.706.901,00
Realisasi Anggaran	: <u>Rp. 1.088.432.595,00</u>
Sisa belum direalisasikan	: <u>Rp. 9.476.274.306,00</u>

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sampai dengan bulan April 2023 tahun berkenaan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja langsung yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dengan 14 sub kegiatan. Kegiatan ini berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Bakesbangpol dan bersifat rutin meliputi 1) kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Realisasi keuangan sampai dengan bulan April 2023 sebesar Rp. 858.531.403,00 dari target Rp. 1.249.210.302,00 atau terealisasi 68,73%. Kemajuan fisik sampai dengan bulan April 2023 sebesar Rp. 0,00,- dari target Rp. 0,00,00 (0,00.%);

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan 3 sub kegiatan yaitu 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan; 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan; dan 3) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Kemajuan realisasi keuangan sampai dengan bulan April 2023 adalah sebesar Rp. 51.157.692,00 dari target Rp. 291.613.086,00 atau terealisasi 17,54%.
3. **Program Peningkatan** Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan 2 sub kegiatan, yaitu : 1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah; 2) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Kemajuan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 19.654.000,00 dari target Rp. 22.930.000,00 atau terealisasi 85,71%;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu : 1) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; 2) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; dan 3) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Dengan kemajuan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 172.878.500,00 dari target sebesar Rp. 2.393.916.421,00 atau terealisasi 7,22%.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Dengan kemajuan realisasi keuangan sampai triwulan II sebesar Rp. 31.246.200,00 dari target sebesar Rp. 49.395.200,00 atau terealisasi 63,26%.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu : 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; dan 6) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kemajuan realisasi anggaran

sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 212.317.800,00 dari target sebesar Rp. 363.594.120,00 atau terealisasi 58,39%).

Evaluasi terhadap hasil renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2022 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 di halaman berikutnya.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
(Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, TC-29)
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2022
KABUPATEN MOJOKERTO**

Nama Perangkat Daerah : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	Unsur Pemerintahan Umum									
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			71,55	51,72	73,83	72,34		
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			79,50	78,58	98,84	79,77		
8.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target</i>	90		90,00	83,33	98,51	90,00		
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen		3 Dok	3 Dok	100	2		
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	7 Dokumen		7 Dok	7 Dok	100	4		
8.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</i>	73,20		90,00	73,20	81,33	90		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	14 Dokumen		14 Dok	14 Dok	100	14		
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Bakesbangpol	12 Bulan		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln		
8.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah</i>			72,00			72,00		
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600		1.200	600	50	12 Bln		
8.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan</i>	82,00		82,00	100	121,95	82,00		
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln		
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln		
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan/Fotocopy	12 Bulan		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln		
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Waktu Penyediaan Paket ATK	12 Bulan		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln		
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln		
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan waktu rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln		
8.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</i>	93,00		93,00	100	107,53	93,00		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln		
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln		
8.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	91,00		91,00	86,67	95,24	91,95		
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	12 Bulan		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln		
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln		
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	83,00		83,00	91,67	110,45	85,00		
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2		2	2	100	3		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan	17		175	175	100	200		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan	100		100	100	100	100		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat	78,66		78,66	91,67	116,54	78,67		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jml sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3		3	3	100	3		
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta pendidikan politik	100		65	65	100	65		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi HAM	100		80	80	100	100		
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah rapat koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kab Mojokerto	4		4	3	75,00	4		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif	97,00		97,00	98,72	101,77	97,05		
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM dan ORMAS yang terdaftar	215		215	235	109,30	215		
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM dan ORMAS yang mengikuti pembinaan	300		300	225	75,00	300		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ORMAS yang menerima/mendapat Bantuan Hibah Keuangan	15		15	15	100	12		
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM dan ORMAS yang diverifikasi	100		100	75	75,00	75		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama	20		20		100	15		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	1		1	1	100	2		
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah rapat koordinasi Tim FKUB	4		4	3	75,00	4		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	100		-	-	-	100		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto	75		75,00	73,33	97,77	88,95		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	20		20	5	25,00	19		
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rapat koordinasi FKDM dan FKDD	8		8	5	62,50	8		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Penanganan Konflik Sosial di daerah	2 Keg 4 Rakor		2 Keg 4 Rakor	2 Keg 2 Rakor	100 50,00	2 4		
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Tim Keamanan dan Ketertiban umum	4		4	3	75,00	4		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	4 Rakor 3 Keg 17 Kasus		4 Rakor 3 Keg 17 Kasus	3 Rakor 3 Keg 11 Kasus	75,00 100 64,71	4 Rakor 3 Keg 15 Kasus		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto, bab II pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto menurut Peraturan Bupati Mojokerto nomor 101 tahun 2021 bab II pasal 2 ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan/ mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sedangkan analisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Mojokerto dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, bela Negara dan wawasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai luhur demi terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Mojokerto dalam kondisi yang heterogen (suku, agama, ras, dan antar golongan).
2. Meningkatnya keamanan, ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
3. Meningkatnya iklim demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat di daerah, menyelenggarakan mediasi, fasilitasi, dan komunikasi bagi institusi masyarakat serta masyarakat itu sendiri agar memiliki pemahaman yang baik mengenai betapa pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab.
4. Meningkatnya kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Ormas/ LSM guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif.

Tabel 2.2
(Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, TC-30)
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021 (Thn n-2)	2022 (Thn n-1)	2023 (Thn n)	2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Th n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			79,77	79,77	80,67	81,57	78,58	-	80,67	81,57	
	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			65,00	67,00	67,50	67,75	51,72	-	67,50	67,75	
01	<i>Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target</i>			90	90	92,5	93,00	83,33	-	92,5	93,00	
1)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			3 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	-	2 Dok	2 Dok	
2)	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun			7 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	7 Dok	-	6 Dok	6 Dok	
02	<i>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</i>			90	90	92,50	93,00	73,20	-	92,50	93,00	
3)	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	-	14 dok	14 dok	
4)	Jumlah Waktu/bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	
03	<i>Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah</i>			72	72	72,25	72,50		-	72,50	72,75	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Th n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5)	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya			25 stell	25 stell	25 stell	26 stell	-	-	25 stell	26 stell	
6)	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			1200 orang	300 orang	300 orang	300 orang	600 orang	-	300 orang	300 orang	
7)	Jumlah peserta Bimteks			-	-	20 orang	21 orang	-	-	20 orang	21 orang	
04	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan</i>			81,90	82,00	83,00	84,00	100	-	83,00	84,00	
8)	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	
9)	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	
10)	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan/Fotocopy			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	
11)	Jumlah Waktu Penyediaan Paket ATK			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	
12)	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	-	12 Bln	12 Bln	
13)	Jumlah Waktu Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	
05	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</i>			-	95	95,5	96,00	-	-	95,5	96,00	
14)	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 2			-	3 unit	3 unit	3 unit	-	-	3 unit	3 unit	
06	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</i>			93,00	93	94	95	100	-	94	95	
15)	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Th n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16)	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	
07	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>			91,00	91,00	93,00	95,00	86,67	-	93,00	95,00	
17)	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	
18)	Jumlah penyediaan Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	
19)	Jumlah Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	
II	<i>Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</i>			83,00	85,00	85,05	85,07	91,67	-	85,05	85,07	
08	<i>Jumlah kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>			2 sub keg	3 sub keg	3 sub keg	3 sub keg	2 sub keg	-	3 sub keg	3 sub keg	
20)	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Reformasi Mental			-	100 orang	100 orang	100 orang	-	-	100 orang	100 orang	
21)	Jumlah Peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan			200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	175 orang	-	200 orang	200 orang	
22)	Jumlah Peserta Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan			100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	100 orang	100 orang	
III	<i>Persentase Partisipasi Masyarakat</i>			78,67	78,67	76,68	76,69	100	-	76,68	76,69	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Th n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
09	Jumlah Pelaksanaan kegiatan bidang Politik dalam negeri			3 sub keg	3 sub keg	3 sub keg	3 sub keg	3 sub keg	-	3 sub keg	3 sub keg	
23)	Jumlah Peserta Pendidikan Politik			100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	65 orang	-	100 orang	100 orang	
24)	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi HAM			100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	80 orang	-	100 orang	100 orang	
25)	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantauan Situasi Politik di Daerah			4 Rakor	4 Rakor	4 Rakor	4 Rakor	3 rakor	-	4 Rakor	4 Rakor	
IV	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif			97,00	97,05	97,07	97,09	99,13	-	97,07	97,09	
10	Jumlah LSM dan ORMAS Yang Terdaftar di Kab Mojokerto			214	215	215	216	235	-	215	216	
26)	Jumlah peserta pembinaan LSM dan ORMAS			300	300	300	300	225	-	300	300	
27)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			37	7	37	37	36	-	37	37	
28)	Jumlah LSM dan ORMAS yang Diverifikasi			100	100	100	100	75	-	100	100	
V	Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama			20,00	15,00	13,50	12,50	100	-	13,50	12,50	
11	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama			1 sub keg	2 sub keg	2 sub keg	2 sub keg	1 sub keg	-	2 sub keg	2 sub keg	
29)	Jumlah Rapat Koordinasi Tim FKUB			4 rakor	4 rakor	4 rakor	4 rakor	3 rakor	-	4 rakor	4 rakor	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Th n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
30)	Jumlah Peserta Sosialisasi Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)			-	100 orang	100 orang	100 orang	-	-	100 orang	100 orang	
VI	Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto			75,00	88,95	88,93	88,91			74,65%	74,65%	
12	Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto			20	19	18	17	15		13,50	12,50	
31)	Jumlah Kegiatan dalam Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			-	2 keg	2 keg	2 keg	-	-	2 keg	2 keg	
32)	Jumlah Kegiatan dlm Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan di Bid Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			-	4 keg	4 keg	4 keg	-	-	4 keg	4 keg	
33)	Jumlah rapat koordinasi tim FKDM, dan tim Forum kewaspadaan Dini Daerah			8 rakor	8 rakor	8 rakor	8 rakor	5 rakor		8 rakor	8 rakor	
34)	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Penanganan unjuk rasa, dan pengamanan Idul Fitri, Natal, tahun baru			5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg		5 keg	5 keg	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021 (Thn n-2)	2022 (Thn n-1)	2023 (Thn n)	2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Th n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
35)	Jumlah Rakor Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kamtibmas dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah			8 rakor	8 rakor	8 rakor	8 rakor	5 rakor		8 rakor	8 rakor	
36)	<i>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota</i>			18	17	16	16	9		16	16	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, dilakukan terlebih dahulu evaluasi, inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan dan kebijakan pelaksanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Mojokerto yang dirumuskan menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, maka dapat ditentukan isu-isu penting, antara lain :

1. Isu melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme;
Menjadi sebuah bangsa yang memegang teguh jati diri merupakan cita-cita besar yang patut diperjuangkan. Bangsa yang setiap elemen masyarakatnya memegang teguh jati diri tidak kehilangan arah dalam berkehidupan apabila selalu menjadikan Pancasila sebagai nilai luhur yang kental dengan sejarah perjuangan bangsa. Seiring berjalannya waktu Pancasila sebagai idiologi mulai melemah dalam pengamalannya disebabkan karena beberapa faktor penyebab melemahnya nilai-nilai Pancasila, antara lain:
 - a. Lemahnya pada penghayatan, pemahaman, dan pengamalan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara.
 - b. Kesadaran hukum dan konstitusi.
 - c. Lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa.
 - d. Kurangnya toleransi sesama anak bangsa.
2. Isu melemahnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya di masyarakat;
Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui keberagaman dalam agama dan berbudaya itu benar adanya. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama dan berbudaya harus selalu dijaga, dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda dan dianut oleh orang lain.
 - b. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda.
 - c. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.
 - d. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya dan merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri.

3. Isu rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi

Lebih dari satu dekade, Indonesia mendorong kebijakan afirmatif dengan menerapkan kuota minimal keterwakilan perempuan di parlemen. Tujuannya menjembatani kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di bidang politik. Namun, hingga kini, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan politik masih rendah ini disebabkan karena pada kenyataannya tidak terlalu banyak perempuan yang terjun ke dunia politik karena faktor kultur yang belum membuka ruang luas bagi keterlibatan perempuan.

Hal itu juga disebabkan keterbatasan modal sosial, politik, dan finansial perempuan. Padahal, keterwakilan perempuan dalam politik formal dibutuhkan untuk memperkuat upaya untuk melahirkan peraturan yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan.

4. Isu melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental); Revolusi mental, tidak terlepas dari krisis mental atau kepribadian bangsa, Politik penyeragaman pada masa lalu dinilai telah mengikis karakter Indonesia dan meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi.

5. Isu kurangnya semangat gotong royong;

Indonesia merdeka karena adanya semangat gotong royong, kebersamaan dan bahu membahu. Setelah reformasi semangat tersebut seperti agak ditinggalkan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan uang atau dana sebagai tolok ukur yang cukup untuk partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Di beberapa desa bahkan secara nyata uang menjadi perusak semangat gotong royong warga desa. Kehadiran dalam sebuah kebersamaan pun terkadang diwakili dengan uang, contoh kecil seperti misalkan tidak hadir ronda cukup bayar denda, tidak hadir dalam pertemuan cukup titip uang iuran dan tidak ikut kerja bakti cukup memberi sumbangan.

6. Isu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan;

Peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat akan sangat berarti dalam menjaga ketertiban dan keamanan merupakan amanah yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah diatur pada kedua Bab XII Pasal 30 yaitu, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Dalam hal ini masyarakat kurang menyadari hal tersebut, sehingga perlunya memberikan pemahaman, pendidikan dan pengajaran arti pentingnya peran serta mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara.

2.3.1 Dampaknya Terhadap Pencapaian Program Secara Nasional

1. Dengan melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme berdampak pada fenomena kecenderungan perilaku dan kepribadian bangsa semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila, dan kehilangan jati diri sebagai suatu individu yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa.
2. Dengan melemahnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, dan berbudaya di masyarakat akan menimbulkan kerawanan, dalam hal ini pemahaman akan pentingnya menanamkan nilai-nilai toleransi yang mulai terkikis perlu untuk digalakkan kembali, karena :
 - Sifat dari masing-masing agama, yang mengandung tugas dakwah atau misi;
 - Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama tentang agamanya sendiri dan agama pihak lain;
 - Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain;
 - Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat;
 - Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah;
 - Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat.
3. Rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi menggambarkan bahwa peran perempuan dan laki-laki belum seimbang.
4. Melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental), berakibat krisis mental.
5. Dampak Kurangnya semangat gotong royong akan tingginya sifat individualisme.
6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, akibatnya keamanan tidak terkendali.

2.3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Tantangan

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan membangkitkan semangat nasionalisme;
2. Meningkatkan semangat jiwa toleransi dan beragama dan berbudaya;
3. Meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam berpolitik;
4. Meningkatkan semangat dalam berkepribadian bangsa untuk menuju revolusi mental;
5. Menimbulkan semangat gotong royong;

6. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah.

b. Peluang

1. Otonomi Daerah;
2. Sumber Daya Manusia yang memadai;
3. Masyarakat yang masih memiliki jiwa toleransi;
4. Peran serta masyarakat yang tinggi;
5. Sikap gotong royong dan dukungan dari pemerintah daerah;
6. Tersedianya stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan daerah;
7. Empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2021 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan baik pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Kesbangpol. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi perangkat daerah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto disusun sebagai landasan dasar dalam menentukan kebijakan strategis dengan harapan mampu memecahkan sebagian persoalan yang dihadapi khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang harus dilakukan Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan Daerah, Nasional maupun global. Perbandingan dilakukan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul agar capaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun dapat tercapai.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto. Ruang lingkup perencanaan pembangunan ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Bupati Mojokerto. Pengukuran pencapaian rencana dan target

yang telah ditetapkan di rencana kerja secara kontinyu dilakukan agar diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3
(Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, TC-31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,07%	3 563.776.966	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,67%	3.686.485.091	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	90	15.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	90	15.000.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	7.500.000	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	7.500.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,50	3.220.495.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,50	3.220.495.000	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bln	3.220.495.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bln	3.220.495.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	83,00	127.874.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	83,00	127.874.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.374.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.374.000	
3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.500.000	
3.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.000.000	
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dok	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dok	2.000.000	
3.5	Penyediaan Bahan / Material	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	19.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	19.000.000	
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	60.000.000	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	105.000.000	
4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	105.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	123.616.901	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	123.616.901	
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	10.000.091	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	10.000.091	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	113.616.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	113.616.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	93	94.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	93	94.500.000	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	26.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	26.000.000	
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi baik	1 unit	55.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	55.000.000	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	13.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	13.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Konflik Umat Beragama / Penganut Kepercayaan dan Suku / Etnis	85,05%	425.000.000	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	85,05%	425.000.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan	3 sub Keg	425.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab Mojokerto	Jml sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 sub Keg	425.000.000	
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	100.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	100.000.000	
1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 orang	250.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 orang	250.000.000	
1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Lap	75.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Lap	75.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partisipasi Masyarakat	78,68%	5.116.745.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partisipasi Masyarakat	78,68%	5.116.745.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jml sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		5.116.745.000	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jml sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3 sub keg	5.116.745.000	
1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jml Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bid Pend Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	126 orang	350.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ emilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab Mojokerto	Jml Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bid Pend Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	126 orang	350.000.000	
1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi rencana aksi HAM	100 orang	75.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi HAM	100 orang	75.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jml Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pend Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan ParPol, Pemilu/ Pemilukada Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27 Lap	4.691.745.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto	Jml Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pend Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan ParPol, Pemilu/ Pemilukada Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27 Lap	4.691.745.000	
IV	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif	97,07%	815.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,07%	950.000.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah LSM dan ORMAS yang terdaftar di Kab Mojokerto	240 LSM/ ORMAS	815.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab Mojokerto	Jumlah LSM dan ORMAS Yang Terdaftar	240 LSM/ ORMAS	950.000.000	
1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	240 LSM/ ORMAS	300.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	240 LSM/ ORMAS	300.000.000	
1.2	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15 orang	475.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15 orang	600.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Lap	40.000.000	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Lap	50.000.000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama	13,50%	100.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama	13,50%	300.000.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 Sub Keg	100.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 Sub Keg	300.000.000	
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 orang	100.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 orang	100.000.000	
1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	200.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto	74,70%	1.165.000.000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto	74,70%	1.450.000.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	18 kejadian	1.165.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	18 kejadian	1.450.000.000	
1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dok	20.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dok	25.000.000	
1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dok	20.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dok	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	225 orang	550.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	225 orang	400.000.000	
1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 orang	90.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 orang	100.000.000	
1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9 Laporan	125.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9 Laporan	400.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 dok	360.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Kab Mojokerto	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	4 dok	500.000.000	
JUMLAH					11.203.230.901					11.928.230.091	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yaitu melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat belum terakomodir semua melalui Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023.

Berikut ini adalah beberapa usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, OKP, serta Partai Politik se Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi masyarakat dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian target. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berikut ini adalah hasil inventarisasi program dan kegiatan yang merupakan usulan/aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4

(Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, TC-32)

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KABUPATEN MOJOKERTO**Nama Perangkat Daerah : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

(Dalam Rupiah)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase LSM dan Ormas yang Aktif		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab Mojokerto	Jumlah LSM dan ORMAS Yang Terdaftar di Kab Mojokerto		
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
	<i>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</i>				
	- Senkom Mitra Polri	Kab Mojokerto		508.490.000	
	- Senkom Mitra Polri	Kab Mojokerto			Hibah Mobil
	- Tim Relawan 87	Kab Mojokerto		111.620.000	Belum terdaftar di Bakesbangpol Kab Mojokerto
	- PWRI	Kab Mojokerto		200.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan dan sasaran merupakan bentuk dan arah masa depan organisasi sehingga dapat mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan untuk memberikan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan dan sebagai gambaran masa depan yang diinginkan dalam periode perencanaan serta untuk mendukung dan mengawal visi dan misi Bupati Mojokerto terpilih periode 2021 – 2026.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan kebijakan penyelenggaraan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI memiliki 1 (satu) Program yaitu, Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik. Didalamnya terdapat 5 (lima) kegiatan prioritas yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Kesbangpol, dengan indikator kinerja berkaitan dengan urusan administrasi internet, serta koordinasi aparat Kesbang se-Indonesia.
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang diarahkan pada pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa serta pendidikan kewarganegaraan.
3. Kewaspadaan Nasional yang diarahkan kepada manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik se Indonesia, serta penyusunan rumusan kebijakan nasional berkenaan dengan kewaspadaan nasional.
4. Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan dengan indikator kinerja diarahkan pada :
 - a. Fungsi, peran, koordinasi, dan fasilitasi berkenaan dengan organisasi/ lembaga kemasyarakatan (seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dan forum publik, penanganan masalah sosial serta perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan–kebijakan berkenaan dengan ketahanan seni, budaya agama dan kemasyarakatan.
 - b. Ketahanan Ekonomi dengan indikator kinerja diarahkan pada penyusunan rumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan ekonomi, fasilitasi, kerja sama, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, serta laporan stabilitas ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

5. Politik Dalam Negeri yang diarahkan pada pemilihan umum, partisipasi dan komunikasi politik, lembaga perwakilan, laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik masyarakat serta penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan politik dalam negeri.

Merujuk kegiatan-kegiatan yang ada pada Permendagri RI nomor 90 tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto menerapkan beberapa kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Mojokerto, yaitu sebagai berikut :

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**, dengan indikator kinerja *Persentase Konflik Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila*, diarahkan pada Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap kemajemukan keanekaragaman budaya, adat melalui forum komunikasi dan silaturahmi antar tokoh etnis, suku dan budaya sehingga tercipta saling menghormati, saling kerjasama dalam kegiatan sosial bermasyarakat / sosial budaya demi mewujudkan kehidupan yang harmonis, bersatu, aman, tentram, dan damai demi menjaga tegaknya NKRI.
2. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**, dengan indikator kinerja *Persentase Partisipasi Masyarakat*, yang kegiatannya difokuskan pada pendidikan politik dan memberikan pemahaman atau pencerahan mengenai aspek-aspek hukum dan HAM bagi pelajar dan masyarakat serta pemantauan perkembangan politik di Kabupaten Mojokerto.
3. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**, dengan indikator kinerja *Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif*, Persentase Pembinaan dan Verifikasi Partai Politik, dengan kegiatan yang difokuskan pada pembinaan LSM dan ORMAS serta memverifikasi ORMAS dan partai politik di Kabupaten Mojokerto untuk memperoleh bantuan hibah keuangan.
4. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**, dengan indikator kinerja *Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama*, diarahkan pada meningkatnya keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, dan golongan.
5. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**, dengan indikator kinerja *Persentase Penurunan Konflik sosial di kabupaten Mojokerto*, dengan diarahkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kondusifitas keamanan Kabupaten Mojokerto dan kesadaran masyarakat pada kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen, dalam rangka

pengecegan, penanganan konflik dan pendataan serta pengawasan orang asing, hal tersebut meliputi fasilitasi terhadap forum-forum antara lain FKDM, FKDD, Pembinaan Wilayah, serta mengimplementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi ipoleksosbudkam.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, yaitu : *Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat.*

Sedangkan tujuan daripada penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah :

- a. Sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perangkat daerah dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.
- b. Menggambarkan arah renja organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renja.
- d. Agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, yaitu : *Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan.*

Berdasarkan sasaran perangkat daerah tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam mencapainya melakukan beberapa cara, antara lain:

- 1) Meningkatkan Peran serta masyarakat utamanya generasi muda terhadap nilai-nilai sejarah bangsa dan Wawasan Kebangsaan.
- 2) Meningkatkan keamanan, ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh budayawan serta elemen masyarakat lainnya.

- 4) Meningkatnya iklim demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat di daerah.
- 5) Meningkatnya kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Ormas/Parpol guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif.

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintahan daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dari terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pada Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan 6 (enam) program dengan 10 (sebelas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada program ini

terdapat 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
ada 2 sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
ada 1 sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
ada 6 sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Penyediaan Bahan/Material
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
ada 2 sub kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
ada 3 sub kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, terdapat satu kegiatan, yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan 3 sub kegiatan :
- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, terdapat satu kegiatan, yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan 3 sub kegiatan :
- a. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdapat satu kegiatan, yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

dengan 3 sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- b. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, terdapat satu kegiatan yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

dengan 1 Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Dengan 6 Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1

(Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, TC-33)

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO**

Nama OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

(dalam Rupiah)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Urusan Pemerintahan Umum								
8 01	Kesatuan Bangsa Dan Politik								
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		67,00				67,50	
8 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80,67	3.697.735.901	APBD Kab. Mojokerto		80,67%	4.042.057.000
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1					
8 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	92,50	15.000.000	APBD Kab. Mojokerto		92,50	15.000.000
8 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	2 dok	7.500.000	APBD Kab. Mojokerto		2 dok	7.500.000
8 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	6 Lap	7.500.000	APBD Kab. Mojokerto		6 Lap	7.500.000
8 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	92,50	3.220.495.000	APBD Kab. Mojokerto		92,50	3.623.057.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	20 Orang/bln	3.220.495.000	APBD Kab. Mojokerto		20 Orang/bln	3.623.057.000
8 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah</i>	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	72,25	11.250.000	APBD Kab. Mojokerto		72,25	13.910.500
8 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	1 Paket	11.250.000	APBD Kab. Mojokerto		1 Paket	13.910.500
8 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan</i>	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	83	127.874.000	APBD Kab. Mojokerto		83	158.000.000
8 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	2 paket	23.374.000	APBD Kab. Mojokerto		2 paket	30.000.000
8 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	4 paket	14.500.000	APBD Kab. Mojokerto		4 paket	15.000.000
8 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	4 paket	9.000.000	APBD Kab. Mojokerto		4 paket	10.000.000
8 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	1 Dok	2.000.000	APBD Kab. Mojokerto		1 Dok	3.000.000
8 01 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	4 paket	19.000.000	APBD Kab. Mojokerto		4 paket	20.000.000
8 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	12 Lap	60.000.000	APBD Kab. Mojokerto		12 Lap	80.000.000
8 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	100	105.000.000	APBD Kab. Mojokerto		100	112.350.000
8 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	3 unit	105.000.000	APBD Kab. Mojokerto		3 unit	112.350.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							
8	01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	93	123.616.901	APBD Kab. Mojokerto		94	126.000.000
8	01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	12 Lap	10.000.901	APBD Kab. Mojokerto		12 Lap	11.000.000
8	01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	12 Lap	113.616.000	APBD Kab. Mojokerto		12 Lap	115.000.000
8	01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	93	94.500.000	APBD Kab. Mojokerto		95	120.000.000
8	01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	6 unit	26.000.000	APBD Kab. Mojokerto		6 unit	30.000.000
8	01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	1 unit	55.000.000	APBD Kab. Mojokerto		1 unit	75.000.000
8	01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	7 unit	13.500.000	APBD Kab. Mojokerto		7 unit	15.000.000
8	01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		85,05%	650.000.000	APBD Kab. Mojokerto		85,07%	550.000.000
8	01 02 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		3 sub keg	650.000.000	APBD Kab. Mojokerto		3 sub keg	550.000.000

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 02 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto	200 orang	250.000.000	APBD Kab. Mojokerto		200 orang	150.000.000
8 01 02 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto	200 orang	250.000.000	APBD Kab. Mojokerto		200 orang	300.000.000
8 01 02 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto	2 Laporan	150.000.000	APBD Kab. Mojokerto		2 Laporan	100.000.000
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat	Kab Mojokerto	78,68%	3.847.675.000	APBD Kab. Mojokerto		78,69%	5.116.745.000
8 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab Mojokerto	3 sub keg	3.847.675.000	APBD Kab. Mojokerto		3 sub keg	5.116.745.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 03 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto	126 orang	350.000.000	APBD Kab. Mojokerto		126 orang	350.000.000
8 01 03 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto	100 orang	75.000.000	APBD Kab. Mojokerto		100 orang	75.000.000
8 01 03 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto	27 Laporan	3.422.675.000	APBD Kab. Mojokerto		27 Laporan	4.691.745.000
8 01 04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif		100	950.000.000	APBD Kab. Mojokerto		100	750.000.000
8 01 04 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM dan ORMAS yang terdaftar di Kab Mojokerto		257 LSM/ Ormas	950.000.000	APBD Kab. Mojokerto		260 LSM/ Ormas	750.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 04 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto	300 orang	300.000.000	APBD Kab. Mojokerto		300 orang	300.000.000
8 01 04 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto	15 orang	600.000.000	APBD Kab. Mojokerto		15 orang	400.000.000
8 01 04 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto	2 Laporan	50.000.000	APBD Kab. Mojokerto		2 Laporan	50.000.000
8 01 05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama		14,50%	300.000.000			14,00%	200.000.000
8 01 05 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		2 Sub Keg	300.000.000			2 Sub Keg	200.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 05 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Mojokerto	40 orang	100.000.000	APBD Kab. Mojokerto		40 orang	100.000.000
8 01 05 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Mojokerto	100 orang	200.000.000	APBD Kab. Mojokerto		100 orang	100.000.000
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto		74,70%	1.200.000.000	APBD Kab. Mojokerto		79,85%	1.350.000.000
8 01 06 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto		18 kejadian	1.200.000.000	APBD Kab. Mojokerto		18	1.350.000.000
8 01 06 2 01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab Mojokerto	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kab. Mojokerto		1 Dokumen	25.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 06 2 01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab Mojokerto	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kab. Mojokerto		1 Dokumen	25.000.000
8 01 06 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	225 orang	150.000.000	APBD Kab. Mojokerto		225 orang	600.000.000
8 01 06 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	56 orang	100.000.000	APBD Kab. Mojokerto		56 orang	100.000.000

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 06 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	9 Laporan	400.000.000	APBD Kab. Mojokerto		9 Laporan	150.000.000
8 01 06 2 01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Mojokerto	4 Dokumen	500.000.000	APBD Kab. Mojokerto		4 Dokumen	450.000.000
JUMLAH					10.645.410.901				12.008.802.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2023 Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan 6 (Enam) program dengan indikator program sebanyak 6 (Enam) dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 30 (tiga puluh) sub kegiatan, sebagaimana tersebut pada tabel halaman berikutnya.

Tabel 4.1
MATRIK RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023

KODE PD : 8.01.01

NAMA PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN			
										OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	8	01	01							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
										Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,67									
										Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,75									
									Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1										
	8	01	01	2	01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	71,01	Bakesbangpol Kab Mojokerto	15.000.000					
	8	01	01	2	01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	Bakesbangpol Kab Mojokerto	7.500.000					
	8	01	01	2	01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	Bakesbangpol Kab Mojokerto	7.500.000					
	8	01	01	2	02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,50	Bakesbangpol Kab Mojokerto	3.106.020.000					
	8	01	01	2	02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bln	Bakesbangpol Kab Mojokerto	3.106.020.000					
	8	01	01	2	06				Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	83	Bakesbangpol Kab Mojokerto	122.895.000					

No	KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
										OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	01	2	06	02			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	Bakesbangpol Kab Mojokerto	20.000.000						
	8	01	01	2	06	04			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		4 Paket	Bakesbangpol Kab Mojokerto	13.500.000						
	8	01	01	2	06	05			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	Bakesbangpol Kab Mojokerto	9.000.000						
	8	01	01	2	06	05			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		1 Dok	Bakesbangpol Kab Mojokerto	2.000.000						
	8	01	01	2	06	07			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4 Paket	Bakesbangpol Kab Mojokerto	18.395.000						
	8	01	01	2	06	09			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Bakesbangpol Kab Mojokerto	60.000.000						
	8	01	01	2	08				<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</i>		93	Bakesbangpol Kab Mojokerto	123.616.901						
	8	01	01	2	08	02			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	Bakesbangpol Kab Mojokerto	10.000.901						
	8	01	01	2	08	04			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Bakesbangpol Kab Mojokerto	113.616.000						
	8	01	01	2	09				<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik</i>		97,00	Bakesbangpol Kab Mojokerto	79.500.000						

No	KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
										OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	01	2	09	02			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		6 unit	Bakesbangpol Kab Mojokerto	26.000.000						
	8	01	01	2	09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 unit	Bakesbangpol Kab Mojokerto	40.000.000						
	8	01	01	2	09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7 unit	Bakesbangpol Kab Mojokerto	13.500.000						
II	8	01	02						Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		1.625.000.000						
	8	01	02	2	01				Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		3 sub keg	Kab Mojokerto	1.625.000.000						
	8	01	02	2	01	03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		200 orang	Kab Mojokerto	1.400.000.000						
	8	01	02	2	01	04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		200 orang	Kab Mojokerto	150.000.000						

No	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	02	2	01	05			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			75.000.000						
III	8	01	03						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			5.726.280.000						
	8	01	03	2	01				Jml sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			5.726.280.000						
	8	01	03	2	01	03			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			275.000.000						
									Jml sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
									Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									

No	KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN																					
										OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK																			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																			
	8	01	03	2	01	04			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		100 orang	Kab Mojokerto	50.000.000																						
	8	01	03	2	01	05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		17 Laporan	Kab Mojokerto	3.422.675.000																						
IV	8	01	04						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif		100%			805.000.000																					
	8	01	04	2	01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			Jumlah LSM dan ORMAS Yang Terdaftar di Kab Mojokerto		257 LSM dan ORMAS			805.000.000																					
	8	01	04	2	01	03			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		300 orang	Kab Mojokerto	290.000.000																						

No	KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN			
										OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	8	01	06	2	01	01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 dok	Kab Mojokerto	20.000.000					
	8	01	06	2	01	02			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 dok	Kab Mojokerto	20.000.000					
	8	01	06	2	01	03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	225 orang	Kab Mojokerto	300.000.000					
	8	01	06	2	01	04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 orang	Kab Mojokerto	80.000.000					

No	KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN				
										OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	8	01	06	2	01	05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		9 Laporan	Kab Mojokerto	120.000.000					
	8	01	06	2	01	06			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	Kab Mojokerto	300.000.000					
JUMLAH													10.564.706.901								

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Renja juga sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta kerjasam seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Dengan adanya Rencana Kerja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi kepala daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah yang membidangi fungsi lain.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto pada tahun lalu akan menjadi acuan kedepan untuk lebih ditingkatkan agar tercapai visi dan misi yang diemban.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto,

baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategik (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Badan/Instansi terkait, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang Kecamatan di tingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten di tingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto merupakan suatu proses perencanaan tahunan yang hendak dilaksanakan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026, Renstra SKPD/OPD 2021-2026, dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dengan harapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini dapat terealisasi dan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2023 disusun dan semoga dapat bermanfaat serta berguna untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Mojokerto yang akan dicapai pada tahun 2023.

Mojokerto, Desember 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto

Drs. Nugraha Budhi Sulistya, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 198903 1 003